

Notaris yang melakukan pemalsuan akta = A notary who falsify the deed

Alysha Athia, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20467726&lokasi=lokal>

Abstrak

ABSTRAK

Supremasi Hukum Indonesia mengalami kemajuan pesat di Era globalisasi informasi dewasa ini, dan maraknya pemberitaan tentang Notaris yang tersandung kasus hukum dengan melakukan pemalsuan dokumen. Notaris sebagai Pejabat Publik sesuai dengan Undang-Undang Jabatan Notaris UUNJN, mengharuskan ketelitian dan kejujuran serta Profesionalitas dalam menjalankan tugas sesuai UUNJN, sehingga meminimalisir terjadinya penyalahgunaan wewenang. Kode Etik Notaris merupakan seluruh kaedah moral yang menjadi pedoman dalam menjalankan jabatan Notaris. Ruang lingkup Kode Etik Notaris berlaku bagi seluruh anggota perkumpulan organisasi Ikatan Notaris Indonesia INI. Ikatan Notaris Indonesia berperan penting dalam penegakan pelaksanaan Kode Etik Notaris, melalui Dewan Kehormatan yang mempunyai tugas melakukan pengawasan atas pelaksanaan Kode Etik Notaris. Kode Etik Notaris selalu berkaitan dengan Undang-Undang Jabatan Notaris karena keduanya merupakan suatu kesatuan yang dijadikan pedoman bagi para Notaris dalam menjalankan jabatannya. Notaris yang melakukan pelanggaran terhadap Kode Etik Notaris dan Undang-Undang Jabatan Notaris akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Salah satu pelanggaran yang dilakukan Notaris dalam menjalankan jabatannya adalah pelanggaran dalam hal pembuatan akta, diantaranya adalah membuat akta-akta yang memuat keterangan palsu didalamnya. Dimana yang menjadi salah satu faktor suatu akta itu memuat keterangan palsu adalah tidak dilakukannya pencocokan fotokopi surat-surat dengan surat-surat aslinya. Pelanggaran seperti itu dapat dilihat dalam kasus pelanggaran Kode Etik dan Undang-Undang Jabatan Notaris yang dilakukan oleh Notaris FS. FS yang dinyatakan melanggar etika profesi notaris oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor, tidak hanya berperan ganda FS, juga menggelapkan sejumlah data tanah dalam akta jual beli. Majelis Hakim Tipikor menyatakan FS yang membuat surat kuasa di bawah tangan.

<hr />

ABSTRACT

The Supremacy of Indonesian Law has progressed rapidly in the era of globalization of information today, and the rise of news about Notaries who stumble over legal cases by falsifying documents. Notary as Public Official in accordance with the Law of Notary UUNJN, requires accuracy and honesty and professionalism in performing tasks according to UUNJN, thus minimizing the occurrence of abuse of authority. Notary Code of Conduct constitutes all moral principles which serve as guidance in running Notary 39 s office. The scope of the Notary Code of Ethics applies to all members of the Association of Indonesian Notaries INI associations. Indonesian Notary Bonds play an important role in enforcing the implementation of the Notary Code of Ethics, through the Honorary Board which has the task of supervising the implementation of the Notary Code of Conduct. Notary 39 s Code of Conduct is always related to the Notary 39 s Office Law because both of them constitute a unity which is used as a guideline for Notaries in running their positions. A Notary who commits a violation of the Notary Code of Ethics and a Notary Position Law shall be liable to sanctions in

accordance with the stipulated provisions. One of the offenses committed by a Notary in carrying out his or her position is a violation in the case of making the deed, such as making deeds containing false information in it. Where that becomes one of the factors the deed contains false information is not the matching of photocopies of letters with the original letters. Such violations can be seen in the case of a violation of the Code of Conduct and the Notary Public Law conducted by Notary FS. FS is accused of violating the ethics of the notary profession by the Panel of Justices of the Corruption Court, not only the dual role of FS, also embezzling some land data in the sale and purchase deed. The Panel of Judges of the Corruption Court stated FS who made the deed under the hand. On the verdict, the Panel of Judges considered FS unprofessional.